



Prosedur Penyusunan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029

Awanda Ayu Az-zahra¹, Berliana Mustika Rani²

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

Email Korespondensi: 23041010095@student.upnjatim.ac.id¹ berliana.rani.fisip@upnjatim.ac.id²

Article received: 04 Januari 2026, Review process: 20 Februari 2026

Article Accepted : 13 April 2026, Article published: 09 Mei 2026

ABSTRACT

The implementation of an Electronic-Based Government System (SPBE) requires systematic planning so that the digital transformation of government can run effectively and sustainably. One important instrument in the implementation of SPBE at the regional level is the SPBE Plan Map which is prepared through certain administrative procedures. This study aims to systematically describe the procedures for preparing the Jombang Regency Electronic-Based Government System (SPBE) Plan Map for 2025–2029 and identify the actors involved along with their roles and responsibilities. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through documentation studies of laws and regulations, preliminary reports, and SPBE planning documents for Jombang Regency. The results show that the preparation of the Jombang Regency SPBE Plan Map was carried out through the stages of planning, implementation, and formulation of results that were systematically arranged and coordinated. The plan map document was arranged in eight SPBE domains, namely governance, management, services, applications, infrastructure, security, ICT audits, and smart cities, with a clear division of roles between regional apparatuses. The discussion shows that the planning map preparation procedure has met the characteristics of administrative procedures, including efficiency, effectiveness, simplicity, consistency, flexibility, and acceptability. This study implies that structured administrative procedures are a crucial factor in ensuring the quality of SPBE planning in local governments.

Keywords: Electronic-Based Government System, SPBE Plan Map, Administrative Procedures

ABSTRAK

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuntut adanya perencanaan yang sistematis agar transformasi digital pemerintahan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan SPBE di tingkat daerah adalah Peta Rencana SPBE yang disusun melalui prosedur administratif tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara sistematis prosedur penyusunan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029 serta mengidentifikasi aktor yang terlibat beserta peran dan tanggung jawabnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, laporan pendahuluan, dan dokumen perencanaan SPBE Kabupaten Jombang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Jombang

dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan perumusan hasil yang tersusun secara sistematis dan terkoordinasi. Dokumen peta rencana disusun dalam delapan domain SPBE, yaitu domain tata kelola SPBE, domain manajemen SPBE, domain layanan SPBE, domain aplikasi SPBE, domain infrastruktur SPBE, domain keamanan SPBE, domain audit TIK SPBE, dan domain kota cerdas SPBE, dengan pembagian peran yang jelas antar perangkat daerah. Pembahasan menunjukkan bahwa prosedur penyusunan peta rencana telah memenuhi karakteristik prosedur administrasi meliputi efisiensi, efektivitas, kesederhanaan, konsistensi, fleksibilitas, dan keterterimaan. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa prosedur administratif yang terstruktur menjadi faktor penting dalam menjamin kualitas perencanaan SPBE di pemerintah daerah.

Kata Kunci: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peta Rencana SPBE, Prosedur Administrasi

PENDAHULUAN

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah langkah strategis pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna mewujudkan penyelenggaraan layanan publik yang lebih andal, interaktif, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik. Secara nasional, pelaksanaan SPBE berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang menjadi kerangka hukum utama bagi penerapan pemerintahan berbasis TIK di Indonesia. Dalam regulasi tersebut, SPBE didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan TIK dalam penyediaan layanan kepada publik. Pada tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Jombang menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2021 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai pedoman pelaksanaan SPBE. Peraturan ini menegaskan bahwa penyelenggaraan SPBE dilakukan dengan berlandaskan prinsip-prinsip efektivitas, integrasi, keberlanjutan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, serta keamanan. Peraturan tersebut juga mengatur penyusunan Peta Rencana SPBE yang mengacu pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan jangka waktu perencanaan selama lima tahun. Penguatan aspek prosedural dan teknis penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Jombang selanjutnya dipertegas melalui Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 81 Tahun 2023 mengenai Pedoman Manajemen SPBE dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang. Regulasi ini mengatur manajemen SPBE sebagai rangkaian proses yang dirancang untuk menjamin pelaksanaan SPBE berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta dilengkapi dengan pedoman audit terhadap infrastruktur, aplikasi, dan keamanan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan SPBE.

Kondisi implementasi SPBE di tingkat daerah dapat diketahui melalui hasil evaluasi resmi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 663 Tahun 2024 mengenai Hasil Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

No.	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	4,43	Memuaskan
2.	Pemerintah Kab. Gresik	4,32	Memuaskan
3.	Pemerintah Kab. Mojokerto	4,16	Sangat Baik
4.	Pemerintah Kab. Sidoarjo	3,96	Sangat Baik
5.	Pemerintah Kab. Jombang	3,91	Sangat Baik
6.	Pemerintah Kab. Sampang	3,67	Sangat Baik
7.	Pemerintah Kab. Pamekasan	3,92	Sangat Baik
8.	Pemerintah Kab. Sumenep	3,73	Sangat Baik
9.	Pemerintah Kab. Bangkalan	2,92	Baik
10.	Pemerintah Kab. Bondowoso	3,86	Sangat Baik

Sumber: Keputusan Menteri PANRAB Nomor 663 Tahun 2024

Berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri PANRAB Nomor 663 Tahun 2024, Kabupaten Jombang memperoleh skor evaluasi SPBE Indeks SPBE sebesar 3,91 dan meraih predikat "Sangat Baik" di antara pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur dan tingkat nasional. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum kinerja tata kelola pemerintahan berbasis digital di Kabupaten Jombang telah berada pada kategori yang baik dibandingkan dengan pemerintah daerah lain di Jawa Timur. Namun demikian, capaian indeks SPBE yang tinggi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan optimalnya implementasi SPBE di tingkat operasional. Dalam praktiknya, penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Jombang masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain fragmentasi layanan antar organisasi perangkat daerah (OPD), proses bisnis yang belum terdigitalisasi secara menyeluruh, serta pengelolaan data yang masih bersifat sektoral dan tersebar. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya keterpaduan sistem dan layanan SPBE. Selain itu, masih ditemukan duplikasi aplikasi, tumpang tindih fungsi layanan, serta aspek keamanan informasi yang belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian evaluasi SPBE dan kondisi implementasi di lapangan, sebagaimana tercermin dalam Laporan Pendahuluan Peta Rencana SPBE Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029.

Penelitian yang dilakukan oleh (Choirunnisa et al., 2023) mengkaji peran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPBE berperan penting dalam mengurangi hambatan fisik masyarakat terhadap layanan publik, meningkatkan efisiensi proses pelayanan, serta mendorong keterbukaan serta partisipasi masyarakat yang lebih aktif. Namun demikian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada dampak dan manfaat penerapan SPBE terhadap aksesibilitas pelayanan publik secara umum, dan belum menelaah secara spesifik proses perencanaan maupun prosedur administratif yang mendasari implementasi SPBE di tingkat pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ibrahim et al., 2020) mengkaji aspek keamanan dalam penerapan layanan publik berbasis SPBE melalui pendekatan kajian pustaka sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPBE menuntut pemerintah untuk memprioritaskan faktor keamanan informasi secara komprehensif, mengingat tingginya risiko yang melekat pada penggunaan teknologi digital dalam layanan publik. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi berbagai model dan kerangka kerja yang dapat digunakan sebagai solusi dalam mengintegrasikan konsep keamanan ke dalam penyelenggaraan SPBE. Namun, kajian ini berfokus pada aspek keamanan SPBE secara konseptual dan belum mengaitkan temuan tersebut dengan prosedur administrasi serta mekanisme perencanaan SPBE dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Angelina et al., 2022) mengkaji penyusunan Enterprise Arsitektur SPBE pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari rencana pengembangan dan penilaian pembangunan daerah. Tujuan penelitian tersebut adalah menghasilkan rancangan blueprint Arsitektur SPBE yang mencakup aspek proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, serta layanan, dengan fokus pada pencapaian tata kelola pemerintahan yang inovatif, bersih, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model konseptual dalam penyusunan arsitektur SPBE dapat mempermudah proses perencanaan dan pengembangan SPBE. Meskipun demikian, studi ini lebih berfokus pada aspek perancangan arsitektur SPBE dan belum membahas secara rinci tahapan prosedural serta tata cara administratif dalam penyusunan dokumen perencanaan SPBE sebagai instrumen kebijakan daerah.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa kajian mengenai SPBE telah banyak dilakukan, terutama dari aspek dampak terhadap pelayanan publik, keamanan sistem, serta perancangan arsitektur SPBE. Namun demikian, kajian yang menelaah mekanisme dan tata cara administratif dalam penyusunan Peta Rencana SPBE sebagai instrumen perencanaan strategis di tingkat pemerintah daerah masih relatif terbatas, khususnya yang menggunakan pendekatan karakteristik prosedur administrasi. Oleh karenanya, studi ini memiliki tujuan untuk menguraikan dan menelaah secara sistematis proses penyusunan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029, sekaligus mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat beserta peran dan tanggung jawabnya dalam mendukung kelancaran penyusunan dokumen perencanaan tersebut.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif sebagai pendekatan penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam sekaligus menyajikan gambaran yang utuh dan menyeluruh mengenai objek kajian melalui pemaparan yang sistematis dengan pendekatan induktif (Nurdin & Hartati, 2019) dalam (Hendiyani & Fansuri, 2024). Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen, yaitu dengan meneliti berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan proses penyusunan Peta Rencana SPBE untuk

Kabupaten Jombang pada periode 2025–2029. Dokumen yang dianalisis meliputi peraturan perundang-undangan terkait SPBE, laporan pendahuluan Peta Rencana SPBE, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan proses perencanaan SPBE. Sebagai lokus penelitian, penulis menetapkan Pemerintah Kabupaten Jombang, dengan fokus kajian pada proses penyusunan Peta Rencana SPBE Tahun 2025–2029. Sasaran penelitian ini adalah dokumen-dokumen resmi yang digunakan dalam proses penyusunan Peta Rencana SPBE. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui tahap penyaringan data, penyajian data, serta pengambilan kesimpulan, dengan mengacu pada karakteristik prosedur administrasi menurut Rasto dalam (Irawan et al., 2020), yang meliputi efisiensi, efektivitas, kesederhanaan, konsistensi, fleksibilitas, dan penerimaan pengguna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029 dilaksanakan melalui prosedur administratif yang tersusun secara bertahap dan sistematis, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan perumusan hasil. Ketiga tahapan tersebut saling berkaitan dan membentuk alur kerja yang terstruktur dalam menghasilkan dokumen perencanaan SPBE sebagai instrumen strategis transformasi digital pemerintah daerah.

Tahap perencanaan merupakan tahap awal dalam prosedur penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029. Pada tahap ini dilakukan inventarisasi data untuk memperoleh gambaran awal kondisi eksisting penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang. Inventarisasi data menjadi dasar penting dalam menentukan arah, kebutuhan, dan prioritas pengembangan SPBE pada periode perencanaan selanjutnya. Perencanaan penyusunan Peta Rencana SPBE mengacu pada Perpres Nomor 95 Tahun 2018 mengenai SPBE sebagai pedoman nasional, serta disesuaikan dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 81 Tahun 2023 mengenai Pedoman Manajemen SPBE dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang. Kedua regulasi tersebut digunakan sebagai acuan dalam menetapkan ruang lingkup, tahapan, serta kebutuhan data dalam proses perencanaan. Inventarisasi data mencakup enam aspek utama SPBE, yaitu layanan, proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur, serta keamanan. Pada aspek layanan, hasil inventarisasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jombang telah memiliki ratusan layanan digital dengan tingkat digitalisasi yang cukup tinggi. Namun demikian, tingkat integrasi layanan dengan sistem nasional seperti Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Online Single Submission (OSS) masih relatif rendah, serta layanan masih tersebar di berbagai aplikasi yang belum sepenuhnya terhubung. Pada aspek proses bisnis, sebagian besar proses kerja telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) atau pemodelan proses bisnis, meskipun implementasi digitalisasi belum merata dan masih ditemukan proses yang dilakukan secara manual. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi proses bisnis belum sepenuhnya menjadi budaya kerja di seluruh perangkat daerah. Aspek data dan informasi menunjukkan adanya kesadaran awal terhadap pengelolaan data,

yang tercermin dari sebagian besar data telah dilengkapi metadata. Namun, mekanisme berbagi data antarperangkat daerah masih belum optimal sehingga menghambat integrasi layanan dan pengambilan keputusan berbasis data. Sementara itu, pada aspek aplikasi, jumlah aplikasi yang digunakan relatif banyak dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih fungsi akibat rendahnya tingkat keterpaduan antaraplikasi. Dari sisi infrastruktur dan keamanan, hasil inventarisasi menunjukkan bahwa sebagian besar infrastruktur telah terhubung ke jaringan internal pemerintah daerah dan upaya pengamanan dasar telah diterapkan. Namun, pengelolaan pusat data yang masih tersebar serta belum meratanya penerapan standar keamanan informasi menunjukkan perlunya penguatan tata kelola infrastruktur dan keamanan SPBE. Hasil tahap perencanaan ini menjadi dasar dalam mengidentifikasi kebutuhan penguatan tata kelola SPBE, sekaligus memperjelas peran dan tanggung jawab aktor yang terlibat, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai koordinator utama SPBE, Bappeda sebagai penanggung jawab perencanaan, serta Inspektorat sebagai pengawas dan auditor pelaksanaan SPBE. Sumber: Laporan Pendahuluan Peta Rencana Implementasi SPBE Jombang.

Tahap pelaksanaan adalah lanjutan dari tahap perencanaan dalam prosedur penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dari masing-masing perangkat daerah untuk memperdalam dan memverifikasi informasi yang telah diperoleh pada tahap perencanaan. Pengumpulan data dilaksanakan secara daring tanpa tatap muka melalui penggunaan spreadsheet terstandar yang disediakan sebagai instrumen pengumpulan data. Penggunaan spreadsheet bertujuan untuk menyeragamkan format pengumpulan data agar informasi yang diterima bersifat terstruktur, mudah dikompilasi, dan dapat dibandingkan antarperangkat daerah. Data dikumpulkan dalam rentang waktu tertentu dan mencakup berbagai komponen penting, seperti domain SPBE, uraian kegiatan, perangkat daerah pelaksana, subkegiatan, akun belanja, output kegiatan, serta alokasi anggaran. Pada tahap pelaksanaan ini, ruang lingkup data yang dikumpulkan mencakup delapan domain SPBE, yaitu tata kelola SPBE, manajemen SPBE, layanan SPBE, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, keamanan SPBE, audit TIK SPBE, dan kota cerdas. Setiap domain berfungsi sebagai kerangka acuan untuk memastikan bahwa seluruh aspek SPBE terakomodasi dalam penyusunan Peta Rencana SPBE. Hasil dari tahap pelaksanaan menunjukkan bahwa perangkat daerah telah berpartisipasi aktif dalam penyampaian data rencana kegiatan SPBE. Data yang terkumpul memberikan gambaran mengenai kondisi saat ini serta rencana pengembangan SPBE di masing-masing perangkat daerah. Selain itu, proses pengumpulan data secara terpusat menunjukkan adanya upaya untuk membangun koordinasi dan konsistensi perencanaan SPBE lintas perangkat daerah.

Tahap hasil merupakan tahap akhir dalam prosedur penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029. Pada tahap ini, informasi yang sudah dikumpulkan dan diverifikasi selanjutnya disusun dan dirumuskan menjadi dokumen Peta Rencana SPBE yang memuat arah kebijakan, program, serta rencana pendanaan SPBE secara terpadu. Hasil penyusunan Peta Rencana SPBE

menunjukkan bahwa dokumen perencanaan yang dihasilkan bukan hanya berperan sebagai panduan teknis, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang menyatukan perencanaan SPBE dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Peta rencana tersebut mencerminkan keterkaitan antara tujuan SPBE, program kegiatan, perangkat daerah pelaksana, serta kebutuhan anggaran yang direncanakan secara berkelanjutan. Peta Rencana SPBE Kabupaten Jombang disusun dalam delapan domain, meliputi tata kelola, manajemen, layanan, aplikasi, infrastruktur, keamanan, audit TIK, dan kota cerdas. Seluruh domain tersebut dirumuskan melalui prosedur perencanaan dan pengumpulan data yang seragam di seluruh perangkat daerah. Sumber: Peta Rencana Implementasi SPBE Jombang Tahun 2025-2029.

Domain Tata Kelola SPBE

Rencana dan alokasi dana untuk SPBE pada Domain Tata Kelola disusun dengan rentang waktu perencanaan 2026–2030. Fokus utama domain ini adalah memperkuat dasar pengelolaan SPBE melalui pembentukan regulasi, strategi perencanaan, dan koordinasi antar perangkat daerah. Kegiatan utama terdiri atas dua aspek:

1. Penyusunan dan reviu dokumen - menitikberatkan pada pembentukan landasan hukum dan strategi perencanaan SPBE, meliputi penyusunan Peraturan Bupati terkait Pemerintah Digital, Penyelenggaraan TIK, serta dokumen Arsitektur dan Rencana SPBE. Kegiatan regulasi dan perencanaan strategis dijadwalkan secara berkala setiap dua tahun (2026 dan 2028), masing-masing menghasilkan satu dokumen, sebagai bentuk pembaruan kebijakan berkelanjutan.
2. Fasilitasi tim koordinasi SPBE - berfokus pada penguatan operasional dan koordinasi antarinstansi. Kegiatan koordinasi direncanakan 2–4 kali per tahun untuk memastikan kelangsungan pelaksanaan SPBE. Alokasi anggaran kegiatan penyusunan dokumen regulasi berkisar Rp5.000.000–Rp7.500.000 per kegiatan, sedangkan kegiatan koordinasi tim SPBE sebesar Rp15.000.000 per tahun, mayoritas dibiayai melalui pos belanja makanan dan minuman rapat.

Pembagian tanggung jawab antar perangkat daerah jelas: Dinas Kominfo bertanggung jawab merumuskan peraturan teknis TIK dan mengkoordinasikan tim SPBE, Bappeda memfasilitasi sistem informasi perencanaan dan arsitektur SPBE, serta Bagian Adm. Pembangunan dan BPKAD menangani standar harga dan biaya. Struktur ini menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk mengelola SPBE secara sistematis dan berdasarkan kewenangan masing-masing lembaga.

Domain Manajemen SPBE

Pada Domain Manajemen SPBE, Pemerintah Kabupaten Jombang memfokuskan penguatan pada manajemen risiko, keamanan informasi, data, layanan, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan budaya organisasi. Fokus ini menunjukkan bahwa pengelolaan SPBE tidak hanya

diarahkan pada elemen teknis, melainkan juga pada kesiapan organisasi dan keberlanjutan tata kelola digital. Manajemen Risiko dan Keamanan SPBE ditetapkan sebagai prioritas tahunan yang dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meminimalkan ancaman siber dan potensi kegagalan sistem. Hal ini tercermin dari pelaksanaan vulnerability assessment dan penetration testing secara rutin dengan alokasi anggaran sebesar Rp76.900.000 per tahun. Upaya tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam melindungi aset informasi dan menjamin keandalan sistem SPBE. Dalam pelaksanaannya, Inspektorat berperan memberikan pendampingan dan memastikan tindak lanjut manajemen risiko dilakukan secara akuntabel serta sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Pada aspek Manajemen Data, arah kebijakan difokuskan pada implementasi program Satu Data Jombang yang dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Program ini mencakup standarisasi metadata statistik serta pengembangan portal data daerah yang didukung oleh jasa konsultasi profesional. Implementasi Satu Data Jombang bertujuan untuk meningkatkan kualitas data pemerintah daerah agar lebih terpadu, mudah diakses, dan dapat dimanfaatkan secara lintas perangkat daerah. Program ini dikolaborasi dengan Manajemen Layanan di bawah koordinasi Bagian Organisasi guna mendorong penyediaan layanan publik yang lebih responsif, terintegrasi, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan budaya organisasi menjadi bagian penting dalam Domain Manajemen SPBE. Pengelolaan SDM TIK yang dilaksanakan oleh BPKAD disusun secara bertahap dan tematik. Pada tahap awal (2026–2027), pengembangan kompetensi difokuskan pada penguatan dasar, seperti pemahaman manajemen proses bisnis dan audit SPBE. Tahap menengah (2028–2029) diarahkan pada pendalaman manajemen risiko dan peningkatan kemampuan teknologi informasi tingkat lanjut. Selanjutnya, pada tahap akhir (2030), pengembangan SDM difokuskan pada manajemen aset TIK dan keamanan siber lanjutan. Selain itu, Manajemen Perubahan dijalankan untuk mengurangi resistensi internal dan membangun budaya organisasi yang adaptif terhadap inovasi digital.

Domain Layanan SPBE

Pada Domain Layanan SPBE, hasil penyusunan peta rencana menunjukkan bahwa pengembangan layanan digital diarahkan pada pembentukan portal layanan terintegrasi sebagai satu pintu akses layanan pemerintahan daerah. Portal ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang sebelumnya tersebar di masing-masing perangkat daerah. Perencanaan domain ini mencakup pengembangan dan pemeliharaan portal layanan, penyediaan layanan pendukung seperti pengelolaan domain, keamanan aplikasi, serta pencadangan data secara berkala. Dinas Komunikasi dan Informatika ditetapkan sebagai penanggung jawab utama dalam menjamin keterpaduan layanan, dengan dukungan perangkat daerah lain sesuai fungsi layanannya.

Domain Aplikasi SPBE

Hasil penyusunan Domain Aplikasi SPBE menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jombang telah memiliki arah pengembangan aplikasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Peta rencana ini menetapkan standarisasi dan integrasi aplikasi layanan publik dan aplikasi internal pemerintahan sebagai strategi utama untuk mengurangi duplikasi sistem dan meningkatkan efisiensi proses bisnis. Setiap perangkat daerah berperan sebagai pelaksana pengembangan aplikasi sektoral dengan pengawasan teknis oleh Dinas Komunikasi dan Informatika guna menjamin kesesuaian dengan arsitektur SPBE, keamanan informasi, serta interoperabilitas sistem.

Domain Infrastruktur SPBE

Hasil penyusunan Domain Infrastruktur SPBE menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jombang merancang penguatan infrastruktur sebagai fondasi utama penyelenggaraan SPBE. Perencanaan infrastruktur difokuskan pada pembangunan pusat data, penyediaan layanan virtual data center, peningkatan konektivitas jaringan intra pemerintahan, serta penyediaan akses internet yang andal dan berkelanjutan. Pengembangan jaringan serat optik, penyediaan koneksi internet utama dan cadangan, serta pengelolaan perangkat TIK dirancang secara bertahap dan terintegrasi. Dinas Komunikasi dan Informatika ditetapkan sebagai pengelola infrastruktur pusat, sedangkan perangkat daerah bertanggung jawab terhadap pengelolaan perangkat di unit kerja masing-masing.

Domain Keamanan SPBE

Hasil penyusunan Domain Keamanan SPBE menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jombang merancang penguatan keamanan informasi sebagai elemen penting dalam menjaga keandalan dan keberlanjutan penyelenggaraan SPBE. Perencanaan keamanan difokuskan pada penerapan manajemen risiko dan manajemen keamanan yang dilakukan secara berkelanjutan untuk melindungi aset informasi pemerintah daerah dari ancaman siber. Upaya pengamanan dirancang melalui pelaksanaan penilaian kerentanan dan pengujian penetrasi secara rutin, penyediaan layanan keamanan jaringan, serta penguatan kapasitas SDM dalam sektor keamanan informasi. Inspektorat berperan dalam mendukung tindak lanjut manajemen risiko, sementara Dinas Komunikasi dan Informatika ditetapkan sebagai sektor utama dalam pengelolaan teknis keamanan SPBE

Domain Audit TIK SPBE

Pada Domain Audit TIK SPBE Pemerintah Kabupaten Jombang merancang mekanisme pengawasan dan pengendalian SPBE untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, standar teknis, dan tata kelola teknologi informasi. Perencanaan audit difokuskan pada pelaksanaan audit infrastruktur dan aplikasi SPBE secara berkala sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan digital. Inspektorat Daerah ditetapkan sebagai aktor utama dalam pelaksanaan audit TIK, dengan dukungan perangkat daerah terkait dalam penyediaan data dan tindak lanjut hasil audit. Audit TIK dirancang terintegrasi

dengan manajemen risiko, pengelolaan data, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Domain Kota Cerdas SPBE

Hasil penyusunan Domain Kota Cerdas SPBE menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jombang merancang pengembangan kota cerdas sebagai langkah guna memperbaiki mutu pelayanan masyarakat dan responsivitas pemerintah daerah. Perencanaan kota cerdas difokuskan pada penyediaan infrastruktur inti yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data serta layanan publik yang cepat dan terintegrasi. Pengembangan Domain Kota Cerdas diarahkan pada penguatan operasional Call Center 112 dan Command Center sebagai pusat koordinasi layanan dan pemantauan kondisi daerah. Selain itu, perencanaan juga mencakup peningkatan interoperabilitas data antar perangkat daerah serta penyediaan akses internet publik untuk mendukung inklusi digital masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika berperan sebagai pengelola utama infrastruktur kota cerdas.

Berdasarkan uraian hasil penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029 pada seluruh domain SPBE, dapat diketahui bahwa proses perencanaan telah disusun secara terstruktur, melibatkan berbagai perangkat daerah, serta dilengkapi dengan arah pengembangan, pembagian peran, dan indikasi pembiayaan yang jelas. Hasil penyusunan tersebut menunjukkan adanya pola prosedural yang sistematis dalam setiap tahapan penyusunan peta rencana SPBE. Oleh karena itu, hasil penelitian ini selanjutnya dibahas dengan mengaitkan temuan tersebut pada karakteristik prosedur administrasi sebagaimana dikemukakan oleh Rasto (2015), guna menilai sejauh mana prosedur penyusunan Peta Rencana SPBE telah memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, kesederhanaan, konsistensi, fleksibilitas, dan keterterimaan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dari hasil penelitian, prosedur penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Jombang menunjukkan efisiensi yang cukup memuaskan. Hal ini terlihat dari pemanfaatan mekanisme koordinasi lintas perangkat daerah melalui rapat-rapat terjadwal serta penggunaan data dan dokumen perencanaan yang telah tersedia sebelumnya, seperti dokumen RPJMD dan arsitektur SPBE. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, proses penyusunan peta rencana dapat dilakukan tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang berlebihan. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Rasto (2015) yang menyatakan bahwa prosedur dianggap efisien jika dapat menghasilkan hasil yang lebih banyak dibandingkan dengan apa yang digunakan, baik dari sisi waktu, tenaga, maupun biaya.

Prosedur penyusunan Peta Rencana SPBE juga dapat dinilai efektif karena mampu mencapai tujuan utama yang telah ditetapkan, yaitu menghasilkan dokumen perencanaan SPBE yang komprehensif, terstruktur, dan selaras dengan kebijakan nasional serta kebutuhan daerah. Hasil penyusunan mencakup delapan domain SPBE lengkap dengan pemetaan aktivitas, penanggung jawab, output, dan indikasi anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur yang diterapkan telah mengarahkan seluruh tahapan kerja untuk mencapai sasaran yang jelas,

sebagaimana dikemukakan oleh Rasto (2015) bahwa prosedur yang efektif adalah prosedur yang mampu mencapai tujuan pekerjaan yang telah ditentukan.

Kesederhanaan prosedur tercermin dari pembagian tahapan penyusunan yang jelas, mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan data, pembahasan lintas perangkat daerah, hingga penyusunan dokumen akhir. Alur kerja yang sistematis dan terdokumentasi memudahkan perangkat daerah untuk memahami peran dan tugas masing-masing. Prosedur ini dirancang sesuai dengan struktur organisasi pemerintah daerah, sehingga tidak menimbulkan kompleksitas yang berlebihan. Hal ini sesuai dengan pandangan Rasto (2015) yang menekankan bahwa prosedur harus sederhana agar mudah dipahami dan diikuti oleh pelaksana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penyusunan Peta Rencana SPBE dilakukan secara konsisten dengan mengacu pada regulasi nasional SPBE serta pedoman perencanaan daerah. Konsistensi ini terlihat dari keseragaman pola penyusunan pada setiap domain SPBE, baik dalam penentuan aktivitas, penanggung jawab, maupun output yang dihasilkan. Dengan adanya standar dan pedoman yang digunakan secara berulang, risiko kesalahan dapat diminimalkan. Hal ini sejalan dengan pandangan Rasto (2015) yang berpendapat bahwa prosedur yang konsisten akan menghasilkan keluaran yang hampir serupa dari waktu ke waktu serta memiliki tingkat kesalahan yang rendah.

Meskipun memiliki struktur yang jelas, prosedur penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Jombang tetap menunjukkan tingkat fleksibilitas yang memadai. Fleksibilitas ini tercermin dari adanya penyesuaian terhadap kondisi dan kebutuhan masing-masing domain SPBE, serta kemungkinan pembaruan dokumen perencanaan secara berkala sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebijakan. Prosedur tidak bersifat kaku, tetapi memungkinkan adanya inovasi dan penyesuaian terhadap perubahan organisasi. Kondisi ini sesuai dengan karakteristik prosedur fleksibel sebagaimana dikemukakan oleh Rasto (2015).

Penerimaan prosedur oleh pengguna dapat dilihat dari keterlibatan aktif berbagai perangkat daerah dalam proses penyusunan peta rencana SPBE. Setiap perangkat daerah diberikan tugas dan wewenang yang diatur dengan jelas sesuai dengan kewenangannya, sehingga prosedur dapat diterima dan dijalankan dengan baik. Selain itu, dukungan pengembangan sumber daya manusia dan manajemen perubahan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan penerimaan prosedur oleh pelaksana. Hal ini sejalan dengan Rasto (2015) yang menegaskan bahwa perancangan prosedur perlu mempertimbangkan aspek sumber daya manusia sehingga prosedur yang dihasilkan dapat dipahami, diterima, dan diterapkan secara optimal oleh para penggunanya.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyusunan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029 telah dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis dan terstruktur, mulai dari perencanaan, pengumpulan dan pengolahan data, koordinasi antar perangkat daerah, hingga perumusan dokumen peta rencana pada setiap domain SPBE. Prosedur kerja yang diterapkan melibatkan aktor-aktor

kunci, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika, Bappeda, Inspektorat, BPKAD, serta perangkat daerah terkait lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Hasil penyusunan peta rencana mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memastikan arah pengembangan SPBE yang terpadu, terencana, dan berkelanjutan sebagai dasar penguatan tata kelola pemerintahan digital.

Berdasarkan pembahasan yang dikaitkan dengan karakteristik prosedur menurut Rasto, dapat disimpulkan bahwa prosedur penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Jombang telah memenuhi unsur efisiensi, efektivitas, kesederhanaan, konsistensi, fleksibilitas, serta dapat diterima oleh para pelaksana. Meskipun demikian, penelitian ini masih terbatas pada penguraian prosedur administratif penyusunan dokumen perencanaan SPBE. Karena itu, disarankan agar penelitian berikutnya meneliti seberapa efektif implementasi Peta Rencana SPBE di tingkat perangkat daerah serta menganalisis dampaknya terhadap peningkatan kualitas layanan publik dan kinerja pemerintahan digital secara lebih empiris.

DAFTAR RUJUKAN

- Angelina, T., Fajrillah, A. A. N., & Hanafi, R. (2022). Penyusunan Enterprise Arsitektur SPBE Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Program Perencanaan Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia*, 16(2).
- Choirunnisa, L., Hajar, T., Oktaviana, C., Ridlo, A. A., Rohmah, E. I., Sunan, U., & Surabaya, A. (2023). Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Spbe) Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik Di Indonesia. *Mei*, 3(1).
- Hendiyani, M. F., & Fansuri, H. (2024). Evaluasi Kebijakan Clearance Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Studi Pada: Kementerian dan Lembaga. *Jurnal Media Birokrasi*, 2, 214–237. <https://doi.org/10.33701/jmb.v6i2.4940>
- Ibrahim, A., Arief, A., & Do Abdullah, S. (2020). Keamanan Untuk Penerapan Layanan Publik Pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE): Sebuah Kajian Pustaka Sistematis. *IJIS Indonesian Journal on Information System*, 5.
- Irawan, R., Kusuma Dewi, I., Wijaya, D., Prana, I., & Indah Cahyani, S. (2020). Analisa Prosedur Administrasi Pengadaan Barang Pada Pt Helix Sukses Makmur Tangerang. *Jurnal AKRAB JUARA*, 5(2), 174–181.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 (2024).
- Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Jombang (2021).

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jombang Nomor 81 Tahun 2023 Tentang Pedoman Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang (2023).

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (2018).

Rahmadi, A. N., Jibril, M., & A'yun, M. (2021). Implementasi E-Government Kota Probolinggo (Studi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 19(3).